



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai bidang pembangunan nagari dan bidang pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari di Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;
9. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
10. Indeks Kesulitan Geografis Nagari, yang selanjutnya disebut IKG Nagari, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan indikator dan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

BAB III  
PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA  
Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian dan Besaran Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran pembagian formula pengalokasian Dana Desa, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan IKG Nagari.

(3) Pembagian dan Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kabupaten Dharmasraya} = \{(0,25*Y1) + (0,35*Y2) + (0,10*Y3) + (0,30*Y4)\} * (0,10*DD)$$

Keterangan:

- A = Alokasi Formula Daerah
- Y1 = Rasio jumlah penduduk Nagari di Daerah terhadap total penduduk Desa Nasional
- Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Nagari di Daerah terhadap total penduduk miskin Desa secara Nasional
- Y3 = Rasio luas wilayah Nagari di Daerah terhadap luas wilayah Desa secara nasional
- Y4 = Rasio IKK Daerah terhadap total IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa/Nagari
- D = Pagu Dana Desa Nasional

(4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

IKG setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV  
PENYALURAN DANA DESA  
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk :

- a. Bidang Pembangunan Nagari
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Nagari dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

Pasal 9

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan nagari pada;

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan.
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada;
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan; dan
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan; dan
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

## Pasal 10

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/keompok dan BUMNagari/BUMNagari Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan; dan
  2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
- b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
  1. penguatan usaha ekonomi warga/keompok dan BUMNagari/BUMNagari Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
- c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:

1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNagari/BUMNagari Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Nagari; dan
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari;
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari;
- d. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Berkembang maupun Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari meliputi:
1. Merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Nagari yang meliputi:
    - a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
    - b) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
    - c) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
    - d) pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Nagari secara transparan dan akuntabel; dan
    - e) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  2. Merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Nagari yang meliputi:

- a) membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
- b) membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Nagari yang partisipatif dan komunikatif; dan
- c) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data Indeks Nagari Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Nagari Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Nagari, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.

#### BAB VI

#### MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Nagari.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Nagari, Pemerintah Nagari menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

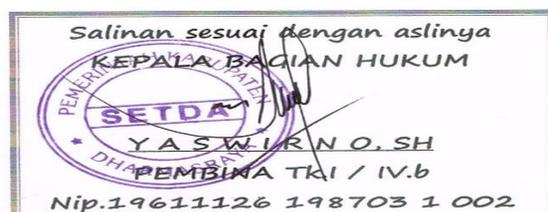
Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 2



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

## NOMOR 2 TAHUN 2017

## TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Kec/Nagari	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
<b>I</b>	<b>KECAMATAN KOTO BARU</b>	<b>2,881,768,000</b>	<b>32,837</b>	<b>14.426%</b>	<b>3.607%</b>	<b>2,100</b>	<b>12.427%</b>	<b>4.349%</b>	<b>158</b>	<b>5.331%</b>	<b>0.533%</b>	<b>103</b>	<b>5.648%</b>	<b>1.694%</b>	<b>10.183%</b>	<b>777,525,181</b>	<b>3,659,294,000</b>
1	KOTO BARU	720,442,000	14,200	6.239%	1.560%	752	4.450%	1.557%	56	1.899%	0.190%	20.53	1.123%	0.337%	3.644%	278,225,535	998,668,000
2	SIALANG GAUNG	720,442,000	7,880	3.462%	0.865%	437	2.586%	0.905%	39	1.331%	0.133%	29.09	1.591%	0.477%	2.381%	181,800,643	902,243,000
3	AMPANG KURANJI	720,442,000	5,057	2.222%	0.555%	250	1.479%	0.518%	33	1.121%	0.112%	25.30	1.384%	0.415%	1.601%	122,203,635	842,646,000
4	KOTO PADANG	720,442,000	5,700	2.504%	0.626%	661	3.911%	1.369%	29	0.981%	0.098%	28.31	1.549%	0.465%	2.558%	195,295,368	915,737,000
<b>II</b>	<b>KECAMATAN PULAU PUNJUNG</b>	<b>4,322,652,000</b>	<b>42,591</b>	<b>18.712%</b>	<b>4.678%</b>	<b>3,724</b>	<b>22.037%</b>	<b>7.713%</b>	<b>511</b>	<b>17.268%</b>	<b>1.727%</b>	<b>131</b>	<b>7.192%</b>	<b>2.157%</b>	<b>16.275%</b>	<b>1,242,645,126</b>	<b>5,565,296,000</b>
5	SUNGAI DAREH	720,442,000	7,573	3.327%	0.832%	784	4.639%	1.624%	54	1.814%	0.181%	21.98	1.202%	0.361%	2.998%	228,876,863	949,319,000
6	TEBING TINGGI	720,442,000	4,635	2.036%	0.509%	479	2.834%	0.992%	119	4.026%	0.403%	25.49	1.394%	0.418%	2.322%	177,295,430	897,737,000
7	EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	720,442,000	8,845	3.886%	0.971%	782	4.627%	1.620%	14	0.473%	0.047%	16.46	0.901%	0.270%	2.909%	222,080,863	942,523,000
8	SUNGAI KAMBUT	720,442,000	8,506	3.737%	0.934%	603	3.568%	1.249%	124	4.176%	0.418%	19.34	1.058%	0.317%	2.918%	222,809,180	943,251,000
9	GUNUNG SELASIH	720,442,000	4,951	2.175%	0.544%	391	2.314%	0.810%	76	2.561%	0.256%	33.28	1.820%	0.546%	2.156%	164,607,474	885,049,000
10	SIKABAU	720,442,000	8,081	3.550%	0.888%	685	4.053%	1.419%	125	4.217%	0.422%	14.91	0.816%	0.245%	2.973%	226,975,317	947,417,000
<b>III</b>	<b>KECAMATAN SUNGAI RUMBAL</b>	<b>2,881,768,000</b>	<b>21,649</b>	<b>9.511%</b>	<b>2.378%</b>	<b>1,063</b>	<b>6.290%</b>	<b>2.202%</b>	<b>282</b>	<b>9.519%</b>	<b>0.952%</b>	<b>106</b>	<b>5.785%</b>	<b>1.735%</b>	<b>7.267%</b>	<b>554,831,949</b>	<b>3,436,600,000</b>
11	SUNGAI RUMBAL	720,442,000	4,789	2.104%	0.526%	224	1.326%	0.464%	6	0.218%	0.022%	16.46	0.900%	0.270%	1.282%	97,869,248	818,311,000
12	KURNIA KOTO SALAK	720,442,000	4,555	2.001%	0.500%	302	1.787%	0.625%	59	1.985%	0.199%	32.86	1.798%	0.539%	1.864%	142,295,402	862,737,000
13	SUNGAI RUMBAL TIMUR	720,442,000	4,119	1.810%	0.452%	154	0.911%	0.319%	3	0.101%	0.010%	24.20	1.324%	0.397%	1.179%	89,994,656	810,437,000
14	KURNIA SELATAN	720,442,000	8,186	3.596%	0.899%	383	2.266%	0.793%	214	7.214%	0.721%	32.22	1.763%	0.529%	2.943%	224,672,643	945,115,000
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN SITIUNG</b>	<b>2,881,768,000</b>	<b>26,641</b>	<b>11.704%</b>	<b>2.926%</b>	<b>2,077</b>	<b>12.291%</b>	<b>4.302%</b>	<b>83</b>	<b>2.811%</b>	<b>0.281%</b>	<b>116</b>	<b>6.320%</b>	<b>1.896%</b>	<b>9.405%</b>	<b>718,099,974</b>	<b>3,599,868,000</b>
15	SITIUNG	720,442,000	7,913	3.476%	0.869%	609	3.604%	1.261%	21	0.699%	0.070%	29.99	1.641%	0.492%	2.693%	205,580,672	926,023,000
16	SIGUNTUR	720,442,000	5,696	2.502%	0.626%	742	4.391%	1.537%	32	1.080%	0.108%	31.51	1.724%	0.517%	2.788%	212,841,620	933,284,000
17	GUNUNG MEDAN	720,442,000	6,445	2.832%	0.708%	355	2.101%	0.735%	17	0.578%	0.058%	26.14	1.430%	0.429%	1.930%	147,351,347	867,793,000
18	SUNGAI DUO	720,442,000	6,587	2.894%	0.723%	371	2.195%	0.768%	13	0.454%	0.045%	27.89	1.526%	0.458%	1.995%	152,326,335	872,768,000
<b>V</b>	<b>KECAMATAN IX KOTO</b>	<b>2,881,768,000</b>	<b>8,990</b>	<b>3.950%</b>	<b>0.987%</b>	<b>2,841</b>	<b>16.812%</b>	<b>5.884%</b>	<b>494</b>	<b>16.686%</b>	<b>1.669%</b>	<b>154</b>	<b>8.428%</b>	<b>2.528%</b>	<b>11.068%</b>	<b>845,097,729</b>	<b>3,726,866,000</b>
19	SILAGO	720,442,000	1,710	0.751%	0.188%	717	4.243%	1.485%	82	2.776%	0.278%	35.20	1.926%	0.578%	2.528%	193,024,066	913,466,000
20	LUBUAK KARAK	720,442,000	1,209	0.531%	0.133%	594	3.515%	1.230%	37	1.261%	0.126%	44.40	2.429%	0.729%	2.218%	169,340,707	889,783,000
21	KOTO NAN EMPAT DIBAWUH	720,442,000	3,233	1.420%	0.355%	498	2.947%	1.031%	124	4.203%	0.420%	32.39	1.772%	0.532%	2.338%	178,544,314	898,986,000
22	BANAI	720,442,000	2,838	1.247%	0.312%	1032	6.107%	2.137%	250	8.447%	0.845%	42.05	2.301%	0.690%	3.984%	304,188,642	1,024,631,000
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN TIMPEH</b>	<b>3,602,210,000</b>	<b>15,828</b>	<b>6.954%</b>	<b>1.738%</b>	<b>654</b>	<b>3.870%</b>	<b>1.355%</b>	<b>258</b>	<b>8.729%</b>	<b>0.873%</b>	<b>174</b>	<b>9.513%</b>	<b>2.854%</b>	<b>6.820%</b>	<b>520,701,648</b>	<b>4,122,911,000</b>
23	TIMPEH	720,442,000	945	0.415%	0.104%	43	0.254%	0.089%	62	2.089%	0.209%	30.53	1.670%	0.501%	0.903%	68,929,230	789,371,000
24	TARATAK TINGGI	720,442,000	5,259	2.310%	0.578%	294	1.740%	0.609%	62	2.091%	0.209%	32.16	1.760%	0.528%	1.923%	146,863,465	867,305,000
25	TABEK	720,442,000	4,562	2.004%	0.501%	182	1.077%	0.377%	92	3.094%	0.309%	38.21	2.090%	0.627%	1.814%	138,537,249	858,979,000
26	PANYUBARANGAN	720,442,000	3,023	1.328%	0.332%	88	0.521%	0.182%	3	0.090%	0.009%	48.89	2.675%	0.802%	1.326%	101,221,544	821,664,000
27	RANAH PALABI	720,442,000	2,039	0.896%	0.224%	47	0.278%	0.097%	40	1.367%	0.137%	24.09	1.318%	0.395%	0.853%	65,150,159	785,592,000
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN KOTO SALAK</b>	<b>3,602,210,000</b>	<b>17,718</b>	<b>7.784%</b>	<b>1.946%</b>	<b>948</b>	<b>5.610%</b>	<b>1.963%</b>	<b>505</b>	<b>17.038%</b>	<b>1.704%</b>	<b>203</b>	<b>11.113%</b>	<b>3.334%</b>	<b>8.947%</b>	<b>683,135,614</b>	<b>4,285,346,000</b>
28	KOTO SALAK	720,442,000	3,706	1.628%	0.407%	163	0.965%	0.338%	22	0.749%	0.075%	39.41	2.156%	0.647%	1.466%	111,960,989	832,403,000
29	AMPALU	720,442,000	2,799	1.230%	0.307%	123	0.728%	0.255%	25	0.831%	0.083%	36.11	1.975%	0.593%	1.238%	94,513,000	814,955,000
30	PADUKUAN	720,442,000	3,785	1.663%	0.416%	180	1.065%	0.373%	428	14.455%	1.445%	45.22	2.474%	0.742%	2.976%	227,231,828	947,674,000
31	PULAU MAINAN	720,442,000	4,127	1.813%	0.453%	219	1.296%	0.454%	12	0.418%	0.042%	44.60	2.440%	0.732%	1.681%	128,318,834	848,761,000
32	SIMALIDU	720,442,000	3,301	1.450%	0.363%	263	1.556%	0.545%	17	0.585%	0.058%	37.80	2.068%	0.620%	1.586%	121,110,962	841,553,000
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN TIUMANG</b>	<b>2,881,768,000</b>	<b>13,575</b>	<b>5.964%</b>	<b>1.491%</b>	<b>494</b>	<b>2.923%</b>	<b>1.023%</b>	<b>108</b>	<b>3.645%</b>	<b>0.365%</b>	<b>156</b>	<b>8.522%</b>	<b>2.556%</b>	<b>5.435%</b>	<b>414,988,281</b>	<b>3,296,756,000</b>
33	TIUMANG	720,442,000	4,545	1.997%	0.499%	380	2.249%	0.787%	37	1.255%	0.126%	29.95	1.638%	0.492%	1.903%	145,320,048	865,762,000
34	SUNGAI LANGKOK	720,442,000	2,828	1.242%	0.311%	51	0.302%	0.106%	24	0.826%	0.083%	39.82	2.179%	0.654%	1.152%	87,990,336	808,432,000
35	KOTO BERINGIN	720,442,000	3,361	1.477%	0.369%	19	0.112%	0.039%	31	1.056%	0.106%	47.40	2.593%	0.778%	1.292%	98,653,136	819,095,000
36	SIPANGKUR	720,442,000	2,841	1.248%	0.312%	44	0.260%	0.091%	15	0.508%	0.051%	38.60	2.111%	0.633%	1.087%	83,024,761	803,467,000

No.	Nama Kec/Nagari	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN PADANG LAWEH</b>	<b>2,881,768,000</b>	<b>6,669</b>	<b>2.930%</b>	<b>0.732%</b>	<b>300</b>	<b>1.775%</b>	<b>0.621%</b>	<b>38</b>	<b>1.293%</b>	<b>0.129%</b>	<b>180</b>	<b>9.821%</b>	<b>2.946%</b>	<b>4.430%</b>	<b>338,205,378</b>	<b>3,219,973,000</b>
37	PADANG LAWEH	720,442,000	1,090	0.479%	0.120%	70	0.414%	0.145%	8	0.277%	0.028%	55.27	3.024%	0.907%	1.200%	91,588,799	812,031,000
38	BATU RIJAL	720,442,000	2,025	0.890%	0.222%	78	0.462%	0.162%	4	0.135%	0.013%	42.79	2.341%	0.702%	1.100%	83,967,308	804,409,000
39	MUARO SOPAN	720,442,000	1,302	0.572%	0.143%	39	0.231%	0.081%	4	0.132%	0.013%	45.50	2.489%	0.747%	0.984%	75,111,412	795,553,000
40	SOPAN JAYA	720,442,000	2,252	0.989%	0.247%	113	0.669%	0.234%	22	0.748%	0.075%	35.97	1.968%	0.590%	1.146%	87,537,860	807,980,000
<b>X</b>	<b>KECAMATAN ASAM JUJUAN</b>	<b>3,602,210,000</b>	<b>14,846</b>	<b>6.522%</b>	<b>1.631%</b>	<b>1,033</b>	<b>6.113%</b>	<b>2.139%</b>	<b>454</b>	<b>15.319%</b>	<b>1.532%</b>	<b>278</b>	<b>15.199%</b>	<b>4.560%</b>	<b>9.862%</b>	<b>752,964,820</b>	<b>4,355,175,000</b>
41	SUNGAI LIMAU	720,442,000	2,700	1.186%	0.297%	104	0.615%	0.215%	68	2.289%	0.229%	42.70	2.336%	0.701%	1.442%	110,071,808	830,514,000
42	ALAHAN NAN TIGO	720,442,000	3,955	1.738%	0.434%	418	2.474%	0.866%	104	3.508%	0.351%	62.58	3.423%	1.027%	2.678%	204,466,887	924,909,000
43	LUBUK BESAR	720,442,000	3,689	1.621%	0.405%	228	1.349%	0.472%	133	4.489%	0.449%	69.86	3.822%	1.147%	2.473%	188,811,011	909,253,000
44	TANJUNG ALAM	720,442,000	785	0.345%	0.086%	127	0.752%	0.263%	19	0.632%	0.063%	56.96	3.116%	0.935%	1.347%	102,866,675	823,309,000
45	SINAMAR	720,442,000	3,717	1.633%	0.408%	156	0.923%	0.323%	130	4.402%	0.440%	45.72	2.501%	0.750%	1.922%	146,748,439	867,190,000
<b>XI</b>	<b>KECAMATAN KOTO BESAR</b>	<b>5,043,094,000</b>	<b>26,272</b>	<b>11.542%</b>	<b>2.886%</b>	<b>1,665</b>	<b>9.853%</b>	<b>3.448%</b>	<b>70</b>	<b>2.361%</b>	<b>0.236%</b>	<b>228</b>	<b>12.460%</b>	<b>3.738%</b>	<b>10.308%</b>	<b>787,051,301</b>	<b>5,830,146,000</b>
46	KOTO BESAR	720,442,000	1,586	0.697%	0.174%	51	0.302%	0.106%	5	0.160%	0.016%	27.75	1.518%	0.456%	0.751%	57,368,747	777,811,000
47	KOTO TINGGI	720,442,000	3,158	1.387%	0.347%	125	0.740%	0.259%	14	0.474%	0.047%	35.81	1.959%	0.588%	1.241%	94,743,019	815,185,000
48	KOTO GADANG	720,442,000	4,726	2.076%	0.519%	395	2.337%	0.818%	11	0.387%	0.039%	21.01	1.149%	0.345%	1.721%	131,379,316	851,821,000
49	BONJOL	720,442,000	3,238	1.423%	0.356%	367	2.172%	0.760%	4	0.137%	0.014%	48.15	2.634%	0.790%	1.920%	146,566,983	867,009,000
50	ABAI SIAT	720,442,000	5,335	2.344%	0.586%	440	2.604%	0.911%	2	0.064%	0.006%	22.09	1.209%	0.363%	1.866%	142,490,071	862,932,000
51	KOTO LAWEH	720,442,000	3,253	1.429%	0.357%	130	0.769%	0.269%	18	0.613%	0.061%	40.97	2.242%	0.672%	1.360%	103,859,546	824,302,000
52	KOTO RANAH	720,442,000	4,976	2.186%	0.547%	157	0.929%	0.325%	16	0.525%	0.053%	31.98	1.750%	0.525%	1.449%	110,643,618	831,086,000
<b>Total</b>		<b>37,462,984,000</b>	<b>227,616</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>16,899</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>2,961</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>1,828</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>7,635,247,000</b>	<b>45,098,231,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	37,462,984,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	33,716,685,600 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	7,635,247,000 (e)
Jumlah Nagari	52 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

